SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE, KEC.DUAMPANUA, KAB.PINRANG



PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE, KEC.DUAMPANUA, KAB.PINRANG



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Sosial

Ekonomi masyarakat Desa Buttu Sawe, Kec.

Duampanua, Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Anugrah Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.3400.028

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakults Ushuluddin, Adab dan Dakwa

B- 1945/In.39.7/09/2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag.

NIP : 196804041993031005
Pembimbing Pendamping : Afidatul Asmar, M.Sos.

NIP : 199103262019031005

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dr. A. Nurki (2001, M.Hum (1) NIP · 1964/231 199203 1 04:

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan

Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buttu Sawe,

Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Anugrah Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.3400.028

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

B 1945/In.39.7/09/2022

Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. (Ketua)

Afidatul Asmar, M.Sos. (Sekretaris)

ABD. Wahidin, M.Si. (Anggota)

A. Nurul Mutmainnah, M.Si. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dr.A.Nurkdam, M.Hum. NIP: 19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR

بسنم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.Atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya tercinta Santi dan untuk Almarhum Ayah saya tercinta Idrus.L. Kepada Ibu saya yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doanya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. selaku pembimbing utama saya dan Bapak Afidatul Asmar, M.Sos. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
- 4. Jajaran Staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
- Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh Stafnya yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
- 6. Keluarga saya, yang selalu memberikan support kepada saya selama ini dalam perkuliahan, dan telah membimbing saya sehingga saya bisa ada di tahap ini.
- 7. Kepada teman-teman saya Minahari, Fitriani, Nurul Azwani, Wahyuni, dan Misni yang telah memberikan banyak bantuan dan tak pernah mengeluh dikala penulis meminta bantuan dan selalu memberi semangat.
- 8. Kepada saudara Ayani terima kasih untuk selalu memberikan dukungan, doa dan semangat.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan macam bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT, selalu melindungi kita dan menuntun kita ke jalan yang benar.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan untuk memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi kedepannya.Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.Aamiin.

Parepare, 3 Januari 2024 Penulis

Anugrah Pratiwi NIM: 19.3400.028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Anugrah Pratiwi

NIM : 19.3400.028

Tempat/Tgl. Lahir : Kamali, 22 Agustus 2001

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan

Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buttu Sawe,

Kec.Duampanua, Kab.Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Januari 2024 Penulis

120

Anugrah Pratiwi NIM: 19,3400.028

ABSTRAK

ANUGRAH PRATIWI.2024. Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang. Skripsi dibimbing oleh bapak H. Muhammad Saleh dan bapak Afidatul Asmar.

Pengelolaan dana desa dalam peningkatan sosial ekonomi menjadi sumber utama untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari apa yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah. Khususnya Desa Buttu Sawe ini dalam pengelolaannya benar-benar terserap untuk peningkatan sosial ekonomi seperti adanya pemberdayaan dan pembangunan ditandai dengan adanya peningkatan dalam sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan masyarakat yang ada di Desa Buttu Sawe. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang ada di desa Buttu Sawe, untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam peningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa Buttu Sawe, dan untuk mengetahui dampak dari dana desa terhadap peningkatan sosial ekonomi bagi masyarakat desa Buttu Sawe.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe sudah berpedoman pada Peraturan perundang-undangan serta peraturan kementrian dalam negeri dan kementrian desa. Dimana dalam proses penganggarannya melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta dengan menggunakan asas transparansi, akuntabilatas, dan partisipasi. Semuanya telah dilakukan oleh pemerintah desa Buttu Sawe sebagaimana mestinya. Dan dari pengelolaan dana desa sudah dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa Buttu Sawe dikarenakan telah terpenuhinya indikator pembangunan ekonomi diantaranya adanya infastruktur desa baik, fasilitas umum yang memadai, dan meningkatnya pendapatan penduduk. Serta adanya program bantuan sosial (Bansos) dari dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa Buttu Sawe sebagai bentuk upaya dalam membantu masyarakat desa yang kurang mampu. Jadi, adanya dana desa di dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat desa Buttu Sawe telah dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Peningkatan Sosial Ekonomi

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMA	N JUDUL	i
PERSETU	JUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESA	HAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PEN	NGANTAR	iv
PERNYAT	CAAN KEASLIAN SKRIPSI Error	! Bookmark not defined.
ABSTRAK	C	vii
DAFTAR I	ISI	ix
DAFTAR T	TABEL	xi
DAFTAR (GAMBAR	xii
DAFTAR I	LAMPIRAN	xiii
TRANSLIT	TERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PEN	NDAHULUAN	
A.	Latar BelakangMasalah	
B.	Rumusan Masalah	
C.	Tujuan Peneliti <mark>an</mark>	
D.	Kegunaan Pene <mark>liti</mark> an	
BAB II TIN	NJAUAN PUSTA <mark>KA</mark>	11
A.	Tinjauan Penelitian Relavan	
B.	Tinjauan Teori	
	1. Pengelolaan	14
	2. Dana Desa	17
	3. Sosial	21
	4. Ekonomi	21
C.	Kerangka Konseptual	24
D.	Kerangka fikir	25

BAB II	І МЕТ	TODE PENELITIAN	27
	A.]	Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
]	B.]	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
(C.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
]	D.]	Fokus penelitian	33
]	E	Jenis dan Sumber Data	33
]	F. '	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
(G.	Uji Keabsahan Data	36
]	Н. ′	Teknik Analisis Data	37
BAB IV	/ HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	A.]	Hasil dan Pembahasan	40
		1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe	40
	,	2. Dampak Dana Desa Dalam Terhadap Peningkatan Sosial Ekonom	i
		Bagi Masyarakat	59
BAB V	PENU	UTUP	69
	A. :	Simpulan	69
]		Saran	
DAFTA	AR PU	STAKA	I
LAMPI	RAN.		. V
PEDON	AN V	WAWANCARA	VI
		PENIII IS XX	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Dana Desa Di Desa Buttu Sawe	7
3.2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	30
3.3	Jumlah Penduduk	31
3.4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Buttu Sawe	31
4.5	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022 Desa Buttu Sawe	50
4.6	Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Buttu Sawe Tahun Anggaran 2022	59
4.7	Pendapatan rata-rata masyarakat Desa Buttu Sawe	
4.8	Dampak dari dana desa dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Desa Buttu Sawe	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	26
3.1	Peta Desa Buttu Sawe	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VI
2	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	IX
3	Surat Rekomendasi Penelitian	X
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XI
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Laporan Reaslisasi APBDesa 2022	XX
7	Dokumentasi Wawancara	XXI
8	Biografi Penulis	XXVI



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonon

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
١	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	ь	Be
ث	Та	t	Те
ث	tha	th	te dan ha
ح	jim	j	Je
۲	ha	h h	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	kha	kh	ka dan ha
7	dal	d	De
2	dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	zai	Z	Zet

<i>U</i> u	sin	S	Es
ش ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Та	ţ	te (dengan titik di bawah)
当	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
[ى	kaf	k	Ka
ل	lam	1	El
٩	mim	m	Mm
ن	nun	n	En
و	wau	W	We
4	ha	h	На
۶	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	у	Ye

Hamzah (*) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah	a	A
1	Kasrah	i	I
1	Dammah	u	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

haula:حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ــَا / ـَـى	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas

	atau ya		
چ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئ.'	dammah dan wau	$\overline{\mathrm{u}}$	u dan garis di atas

Contoh:

māta : ماتَ

ramā : رَ مَی

qīla : قِيْلَ

yamūtu : يَمُوْتُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah : رَوْضَهُ الْخَلَّةِ

al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah : ٱلْمَدِيْنَهُ القَاضِاةِ

: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: Rabbanā

:Najjainā

: al-hagg

al-hajj : al-hajj

nu ''ima : أَعَّمَ

غُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf عن bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (رق), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf \(\frac{1}{2} \) (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

ta'murūna : تَأْمُرُوْنَ

: al-nau

ي نني غُ : syai 'un

: Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan $Ab\bar{u}$ (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = $subh\bar{a}nah\bar{u}$ wa taʻ $\bar{a}la$

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص

صلى الله عليه وسلم = صهعى

طبعة = ط

بدونناشر = دن

إلى آخر ها/إلى آخره = الخ

جزء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. :"Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

PAREPARE

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan hindia belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah manyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Disamping itu, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian wilayah Indonesia ada di Pedesaan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa terpisah dari keuangan pemerintah Kabupaten. Pemisahaan dalam penatausahaan Keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya

¹ Agus Ashari, dan Jumardi. 'Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol, 6 No,1 (2021). h. 53.

upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunanakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.²

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus mulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. pemerintahan desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintatahan kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luasa dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaaan yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam mendukung terselenggaranya otonomi desa adalah pembiayaan atau keuangan. Pemerintah desa dalam mewujudkan peran penting tersebut harus memerlukan dukungan berupa dana. Pemerintah daerah dengan pemerintahan desa memiliki bentuk hubungan keuangan yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa dan memberikan pelayanan yang prima dengan memberdayakan masyarakat desa agar berpartisipasi dalam melakukan program

²Sukanto, 'Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan'.Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol, 12 No, 1. (2014). h. 29-41

pembangunan baik secara fisik ataupun non fisik sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa dan masyarakat desa yang sejahtera (Sari et al.,2017).³

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan pasal 72 Ayat 1 huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan pada peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintahan Nomor 168 Tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- 1. Alokasi dasar, dan
- 2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁴

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyeleggarakan otonomiya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

³Nor Aufa Azizah, dan Selamat Riadi. 'Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatka Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala'. Jurnal Geografika. Vol. 2 No. 1 (2021). h. 22.

⁴ Azwardi, Sukanto. 'Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No, 1.(2014). h. 3

memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. ADD sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- 1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- 3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar, dll.

Upaya untuk mensejahtrekan masyarakat desa tidak lari dari upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis kelembagaan lokal, peran sumber manusia yang mampu serta profesional dapat dijadikan refleksi pada situasi dan keinginan. Membuah kembangkan nilai-nilai kesetiakawanan, kebersamaan, hidup saling tolong menolong sebagai modal masyarakat untuk menggerakan masyarakat miskin, menumukan potensi-potensi lokal untuk dikelola sebagai sumber energi bersama.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah

desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan da pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.⁵

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

- 1. Membina kehidupan masyarakat desa.
- 2. Membina ekonomi desa.
- 3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan undang-undang.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu, salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat perlu diterapakan karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tugas aparat pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa merupakan suatu amanah yang harus

-

⁵Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwando. 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Malang, Jurnal Administrasi Publik, 2014), h. 2

dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggung jawaban ini mencakup semua aspek yang telah dalam peraturan perundang-undangang negara. Selain pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pengelola anggaran desa juga memperhatikan prinsip amanah sebagai wujud ekonomi ummat.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:58

Terjemahnya:

"sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Susungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat".

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk desa.

Dalam Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Penggunaan dana desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak

_

 $^{^6}$ Kementrian Agama RI. $Al\mathchar`-Qur'an\ dan\ Terjemahannya,$ (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.110

menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah agar sesuai dengan Tujuannya dan sesuai dengan Fungsi – Fungsinya.

Desa Buttu Sawe merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan duampanua, kab pinrang. Di Desa Buttu Sawe memiliki anggaran Dana Desa yang berasal dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana yang didapatkan ini kemudian dalam proses pengalokasiannya dibagi ke dalam 5 bidang yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Kelima aspek ini bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa Buttu Sawe.

Tabel 1.1

Jumlah Dana Desa di desa Buttu Sawe

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	1.998.815.000,00
2.	2022	1 <mark>.90</mark> 8.338.736,00

Sumber: Dana Desa Buttu Sawe

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwasanya pada tahun 2021 jumlah dana yang diterima yaitu Rp. 1.998.815.000,00. Dan pada tahun 2022 jumlah dana yang diterima yaitu Rp. 1.908.338.736,00. Data diatas merupakan jumlah dana desa yang di salurkan oleh pemerintah pusat terhadap desa Buttu Sawe yang dimana telah terbagi menjadi dana pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, serta penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Hanya saja pada tahun 2022 jumlah dana yang

disalurkan sedikit turun yaitu dari Rp. 1.998.815.000,00 turun menjadi Rp. 1.908.338.736,00.

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu tugas pemerintah desa adalah menggunakan dana desa untuk masyarakat pedesaan dalam membantu peningkatan sosial ekonomi mereka. Salah satu yang perlu diperhatikan didalam hal ini yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas. Maksudnya dimana dalam pengelolaandana desa tidak ada yang dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, dan berdasarkan dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan pengelolaan dana desa yang baik dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa dan sebaliknya jika pengelolaannya kurang baik maka di dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat desa tidak mengalami kemajuan, serta untuk memastikan serta mengetahui apakah pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe sudah baik atau sebaliknya di dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di desa Buttu Sawe. Karena pemerintah harus mengoptimalkan pelayanan publik dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa, karena ini merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran suatu desa.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh dan membuat dalam bentuk skripsi yang berjudul " Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di desa Buttu Sawe?
- 2. Bagaimana dampak dana desa terhadap peningkatan sosial ekonomi bagi masyarakat Desa Buttu Sawe ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang ada di desa Buttu Sawe.
- 2. Untuk mengetahui dampak daridana desa terhadap peningkatan sosial ekonomi bagi masyarakat desa Buttu Sawe.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang prosesPengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa buttu sawe mengenai pengelolaan dana desa, dan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam sosial ekonomi masyarakat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relavan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah pada tahun 2020 dengan judul "pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat (Studi kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat,

⁷ Husnul Khatimah. 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)'. (Skripsi Sarjana: *Jurusan Ekonomi Syariah*, 2020). h. 8

sedangkan peneliti yang sekarang hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana desa serta menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Sofianto, yang berjudul "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program langsung APBN berupa anggrana dana desa, selain itu mengetahui bagaimana kontribusi dana desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa peningkatan aksebilitas masyarakat desa dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Adapaun kendala dalam proses pelaksanaan program dana desa adalah masih kurangnya kapasitas perangkat desa dan masyarakat juga belum sepenuhnya memahami prosedur dana desa.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai bagaimana upaya dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana desa. sedangkan penelitian terdahulu hanya terfokus pada kontribusi dan desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dana desa, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan olehIta Ulumiyah, dkk yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa

_

⁸Arif Sofianto, 'Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat', dalam *Matra Pembaharuan*, Vol.01 No.)1, 2017

sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapaun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa sumber pasir telah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-program diantaranya: pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat seperti, perlombaan desa, musrenbang desa, pembangunan fisik desa, selain itu ada peningkatan ekonomi produktif dengan adanya pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. ⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai upaya dalam meningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana desa, dan juga terletak pada tempat penelitian. sedangkan penelitian terdahulu ini tidak menyinggung sama sekali terkait dengan pengelolaan dana desa. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah samasama membahas tentang pemberdayaan masyarakatdan menggunakan metode yang sama yaitu penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teoritis merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian. Teori adalah satu konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang manyajikan suatu pandangan yang sistematik mengenai suatu fenomena atau untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. ¹⁰Setiap penelitian membutuhkan beberapa teori yang relevan untuk mendukung studi ini yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁹ Ita Ulumiyah, dkk. 'Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa'. dalam *Jurnal Administrasi Public (JAP)*, Vol.01 No.05, 2013

 $^{^{10}}$ Tim penyusun, $Pedoman\ Penulisan\ Karya\ Tulis\ Ilmiah,$ (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 21

1. Pengelolaan

Dalam kamus indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.¹¹

secara umum pengelolaan juga merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Suharsimi arikunta, pengelolaan adalah subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. 12

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapain tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, tedapat tiga faktor yang terlibat yaitu : adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, dan proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengedalian dan pengawasan, serta adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹³

Suharsimi Arikunta, 'Pengelolaan Kelas dan Siswa', (Jakarta: CV. Rajawali, 1998), h. 8
 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manjemen, (Jakarta: Kencana Perdana MediaGoup, 2009). h. 6

¹¹ Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengeorganisasian, pengerakan dan pengawsan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

a. Tahap Pengelolaan

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) 113 Tahun 2004 Tentang pengelolaan dana desa menjelaskan bahwa, "Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan dana desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan diakhiri denganpertanggungjawaban.

b. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2004 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagai berikut:

 Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang dana desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

- benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Akuntabel yaitu perwujudan kebijakan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.

Sehingga, program-program masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah bukan dimaksudkan untuk mengganggu atau memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, program senantiasa dengan pengorganisasian yang matang.

Pengorganisasian masyarakat itu sendiri adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan local masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Pengorganisasian masyarakat juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang menunjang kemajuan masyarakat, namun titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumberdaya. Sedangkan, menurut Jack Rothman mengartikan pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk intervensi pada tingkat masyarakat (community level)

yang diarahkan untuk peningkatan atau perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemecahan masalah masyarakat.

Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan (civil society) yang menunjang tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomis, politik dan budaya.

2. Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Kemudian, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa terdapat tujuh sumber pendapatan dana desa diantaranya berasal dari Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 14

Pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN saat ini dikenal sebagai dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa merupakan salah satu implementasi visi kerangka NKRI. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan

 $^{^{14}\}mathrm{A}$ saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* (Jakarta, Media Pustaka. 2014), h. 4

menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.¹⁵

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsipprinsip berikut ini :

- 1. Keadilan, yaitu : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- Kebutuhan prioritas, yaitu : mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- 3. Kewenangan desa, yaitu : mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 4. Partisipatif, yaitu : mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- 5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu : pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.

¹⁵http:/www.Kemenkeu.go.id/dana-desa (Diakses, 22 Februari 2023)

6. Tipologi desa, yaitu : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Kemudian, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan dana desa adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik didesa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Mengutamakan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan proyek dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendanai kelompok kegiatan dan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan kewirausahaan warga atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperluas pribadi atau skala ekonomi masyarakat, yakni :

- a. Bidang kegiatan pemberd<mark>ay</mark>aan ekonomi lainn<mark>ya</mark> yang memenuhi kebutuhan desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa.
- b. Mendukung kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan masyarakat.
- c. Memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan pedesaan.
- d. Mendukung aktivitas ekonomi, baik yang dikembangkan bersama oleh BUM desa, atau yang dikembangkan oleh kelompok serta lembaga ekonomi masyarakat lain.

- e. Meningkatkan investasi ekonomi desa dengan membeli, mengembangkan ataupun membantu peralatan produksi, dana, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- f. Pengorganisasian masyarakat, sarana dan prasarana pelatihan paralegal serta bantuan energi masyarakat desa, misalnya pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.
- g. Meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dalam energi terbaru serta perlindungan lingkungan. ¹⁶

Sehingga, maksud dari pemberian dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:¹⁷

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara pastisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemertaan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

 $^{^{16}}$ Dikjen PPMD, Pokok-pokok Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Permendesa No.B 2016

¹⁷Suparno A.Suhaenah, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga,2001). h.56

3. Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Sosial selalu berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial. ¹⁸Kondisi sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial dan proses sosial terjadi karena adanya interkasi sosial. Sedangkan menurut Soedjono Soekanto, bahwa yang dimaksud sosial adalah prestise secara umum dari seseorang dalam masyarakat.

Secara khusus kata Sosial maksudnya adalah hal-hal mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama (Shandily, 1993:1-2). Pembentukan struktur sosial, dan terjadinya proses sosial dan kemudian adanya perubahan-perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembangan dalam kehidupan bersama.

4. Ekonomi

Ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus merupakan studi mengenai bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang yang bernilai, kemudian mendistribusikannya terhadap kelompok masyarakat lainnya. ¹⁹Sedangkan menurut Abdurrahman, ekonomi merupakan ilmu dan

¹⁸ Soekanto, Soerjono. Kamus Sosiologi. (Jakarta : CV. Rajawali. 1983), h. 184

¹⁹ Paul A Samuelson & William D Nordhaus, *Economics International Edition*, (Singapore Tien Wah Press, 1989), h.5.

pembelajaran tentang usaha manusia dalam memperoleh alat—alat materi untuk memenuhi kebutuhan. ²⁰Ekonomi diartikan sebagai cara ilmu yang menerangkan caracara menghasilkan, mengedarkan membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. ²¹ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia (produksi dan distribusi) dalam mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Hassan Shadily Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah Orang—orang yang hidup bersama di mana menghasilkan atau membentuk sebuah kebudayaan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang berkumpul dan hidup dalam sebuah lingkungan dan saling berinteraksi satu sama lain.

Ekonomi masyarakat adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya. pengelolaan sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya di sebut usaha kecil dan menengah. Yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi

²² Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta),h.47

_

²⁰ Abdurrachaman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, (Jakarta:PT.Pradnya Pramita, 1991), 371–372.

²¹ M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h.24.

kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Adapun indikator perekonomian masyarakat yakni sebagai berikut:

- 1. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (produktive service) yang mengalir kearah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat kepihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapat dari aktivitas produktif.²³
- 2. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutah merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata).

Peningkatan Ekonomi Masyarakat berarti upaya membangkitkan kemampuan, memberikan kebebasan, serta kesempatan kepada masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berupaya untuk berada dalam kondisi yanglebih baik dari sebelumnya.

²³ Munifa, *Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Ptpn Xi Pabrik Gula Padjarakan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.* Jurnal Skripsi, 2013, h.6.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian pengelolaan dana desa

Mengelola dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun subtantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlpeas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. Menurut Didit Herlianto (2017:3) prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain:

- 1. Rancangan APBDesa yang berbasis program
- 2. Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah
- 3. Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat
- 4. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata sosial berarti segala sesuatu yag

2. Pengertian Sosial Ekonomi

berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yag artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa ada

bantuan orang lain disekitar sehingga kata sosial dapat ditafsirkan hal-hal yag berkaitan dengan masyarakat.²⁴Sosial ekonomi di definisikan sebagai sebuah kajian

_

²⁴Muhammad Zunaidi, 'Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi Dan Pembangunan Pasar Modern'. Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3 No. 1, 2013. h. 53

yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang ada didalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. ²⁵

Menurut Kusnadi, Sosial Ekonomi adalah kondisi kependudukan yang ada meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan menurut Manaso Malo juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yaitu, merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan sosial ekonomi adalah posisi seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang kondisinya memungkinkan setiap individu atau kelompok dapat mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup. ²⁶Kondisi sosial ekonomi penduduk dapat diamati dari tingkat pembangunan, tingkat pemberdayaan, dan kondisi ekonomi penduduk. Kondisi sosial ekonomi penduduk mempengaruhi tingakat kesejahteraannya. Penduduk dengan tingkat otonomi tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Sementara itu penduduk yang memiliki tingkat ekonomi rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

D. Kerangka fikir

Kerangka fikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap

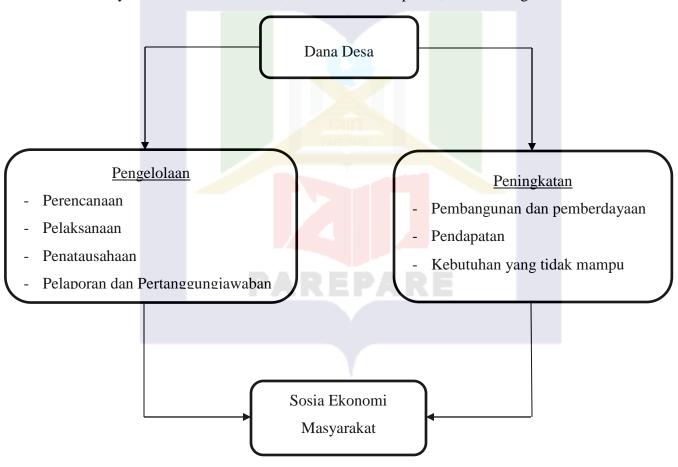
²⁵Damsar, Indriyani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 11

_

²⁶Basrowi dan Siti Juariyah, 'Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.' *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 7 No. 1 April 2017. h. 60

masalah penelitian. Dalam kerangka fikir peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih rinci. Dengan menjelaskan tentang hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Kerangka fikir dalam penelitian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana proses pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa. Untuk mengetahui hal tersebut, maka digunakan beberapa teori dalam menyelesaikan masalah. Dengan teori tersebut dapat membantu penulis dalam meneliti mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kab Pinrang.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas. ²⁷Serta menurut Denzim dan Lincion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. ²⁸Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapat uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. ²⁹

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karekter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.³⁰

 $^{^{\}rm 27}$ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori & prakti,k* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitati,f* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 105

³⁰ Burhan Bungis, *Analisis data Penelitian Kualitatif, Pemahaman dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 53

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pihak pemerintah desa Buttu sawe, ³¹ yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang pengelolaan dana dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat desa Buttu sawe, kecamatan duampanua kabupaten pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan mengunjungi lokasi terkait penelitian untuk melakukan wawancara sekaligus adanya pengambilan data yang diperlukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian agar tujuan penulis dapat terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Alasan saya demikian memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan lokasi tersebut memenuhi variabel yang telah penulis susun yaitu adanya pengelolaan dana desa.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian dalam waktu± 2 bulan. Dimana jangka waktu tersebut peneliti akan melakukan wawancara

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 50

dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi acuan atau mendukung hasil penelitian ini.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Buttu Sawe adalah salah satu pecahan dari Desa Bungi yang dimekarkan menjadi tiga Desa pada tahun 1989 yaitu Buttu sawe sendiri, Desa Buttu Sawe dan Desa Maroneng. Pada tahun 1989 Desa Buttu Sawe menjadi Desa Persiapan dan pada tahun 1991 resmi menjadi Desa defenitip baik secara administrative maupun secara geografis wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Desa Buttu Sawe meliputi kampung Sanja, kampung Baru, kampung Kamali, kampung Waru dan kampung Maung.

Desa Buttu Sawe adalah salah satu desa di kecamatan Duampanua yang mempunyai luas wilayah + 3261 Ha. Dilihat dari topografi dan konsturuksi tanah, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua secara umum berupa persawahan, Perkebunan dan Perbukitan yang berada pada ketinggian antara 500 mdpl di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 26 s/d 30 Celcius. Desa Buttu Sawe terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, 9 (Sepuluh) RK. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kabupaten 40 km. Dengan waktu tempuh 45 menit. Batas-batas administratif pemerintahan Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pakeng Kec. Lembang

- Sebelah Timur : Desa Kassa Kec. Batulappa

- Sebelah Selatan : Kelurahan Data Kec. Duampanua

- Sebelah Barat : Desa Bungi Kec. Duampanua



Gambar 3.2 Peta desa buttu sawe
Tabel 3.2

Luas Pemukiman	197,60 ha/m²
Luas Persawahan	568,10 ha/m ²
Luas Perkebunan	493, 03 ha/m²
Luas Kuburan	0,87 ha/m²
Luas Hutan	2.015,00 ha/m²
Luas Pekarangan	85,00 ha/m²
Perkantoran	0,20 ha/m²
Luas Prasarana umum lainnya	2 ha/m²
Total Luas	3261 ha/m²

1. Gambaran Umum Demografis

Desa Buttu Sawe adalah salah satu desa di Kecamatan Duampanua dengan Jumlah penduduk sebanyak 2848 jiwa yang terdiri dari 1446 laki-laki dan 1402 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 682 KK.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk

Jumlah Laki – Laki	1.446 Orang		
Jumlah Perempuan	1.402 Orang		
Jumlah Total	2.848 Orang		
Jumlah Kepala Keluarga	682 KK		

2. Keadaan Mata Pencaharian

Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi di Desa Buttu Sawe, perlu untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari pendapatan dan mata uang yang mereka gunakan, yang dapat dilihat dari ambang batas perekonomian masyarakat secara keseluruhan di antara mereka yang memiliki ekonomi lemah, sedang, dan tinggi.Sesuai dengan mata pencarian yang mereka tekuni, Informasi tentang pekerjaan yang mereka dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.4
Mata Pencarian Masyarakat Desa Buttu Sawe

No	Keterangan Jumlah	
1	Petani	860 Orang
2	Buruh	697 Orang
3	Pedagang	59 Orang
4	Peternak	87 Orang
5	TNI/POLRI	4 Orang
6	PNS	36 Orang
7	Pengusaha Kecil Menengah	61 Orang

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa mata pencarian masyarakat Desa Buttu Sawe ada berbagai macam, seperti: Petani berjumlah 860 Orang, Buruh berjumlah 697 Orang, Pedagang berjumlah 59 Orang, Peternak berjumlah 87 Orang,

TNI/POLRI berjumlah 4 Orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 36 Orang, Pengusaha Kecil Menengah berjumlah 61 Orang.

3. Sturktur Organisasi Desa Buttu Sawe

Sotk Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua **Kabupaten Pinrang KEPALA DESA ABDUL KARIM BPD** LKD, BD, KABUMD **BKTM SEKRETARIS EBIET ABDUL RASYID BABINSA NASRUL. B K.Keuangan K.Pemerintahan K.Umum** Kasi . Kesejahteraan BASRI, S. Kom. I **SYAMSUL ALAM** ST.NURHAINI,SE SULPI, SE **Kadus Kamali** Kadus Kamp.Baru **Kadus Passolengang BOHARI ABD. AZIS LEWANG TAJUDDIN**

D. Fokus penelitian

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian ini berfungsi untuk memberikan suatu batasan atas hal-hal yang akan diteliti. Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka fokus penelitian ini perlu dikemukakan untuk memberi gambaran yang lebih fokus tentang apa yang akan diteliti dilapangan.

Fokus penelitian ini bermanfaat dalam memberikan arah selama dalam proses penelitian, utamanya pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan tujuan daripada penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini akan berfokus pada proses Pengelolaan dana desa dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

 32 Moh Kasrian, $Metode\ Penelitian\ Kualitatif,\ Cet.II (UIN\ Maliki\ Press,\ 2010),\ h.\ 53$

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh.Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya.pada penelitian ini sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dari proses peninjauan langsung pada objek penelitian yang ada dilapangan, dan data tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data mengenai penelitian. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lainnya. Data primer yang diperoleh melalui wawancara adalah bersumber dari pemerintah desa tentang pengelolaan dana dalam peningkatan sosial ekonomi di desa Buttu Sawe.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. ³⁴Pada umumnya, data yang diperoleh dari refernsireferensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumendokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 23
 Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91

_

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interprestasi dari peneliti.³⁶

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal.

Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan melakukan proses penggalian informasi dengan memberikan pertanyaan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19,h. 224

Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h. 207
 Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), h. 62

³⁸ Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif': wawancara, (*Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, 2017), h. 35

terbuka terhadap responden yang terkait.Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu perangkat Desa Buttu Sawe.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui obserasi dan wawancara. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis, yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus menjadi pelengkap agar data yang diperoleh lebih objektif.

G. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini membutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif agar dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diproleh peneliti dengan data yang terjadi sensungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggungjawabkan. ³⁹Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

³⁹Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi), (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 23.

1. Uji Kreadibilitas

Uji kreadibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. ⁴⁰Kreadibilitas yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebuah data sehingga mampu membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas dilapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Uji Transferability

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan secara keseluruhan mulai dari menentukan focus penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, analisis data, keabsahan data, hingga pengembalian kesimpulan.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Neong Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara,

⁴⁰ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, (Makassar: Masagena Press, 2011), h.21-22

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)h.276

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan denga berupaya mencari makna. 42

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenal fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisis penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. ⁴³Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33, 2018), h. 84
 Ahmad Rijali, (Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33, 2018), h. 91

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.⁴⁴

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi data yaitu penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahap analisis, sehingga keseluruhan mendapat data akhir sesuai dengan kategori data dan permasalahannya, pada bagian akhir ini akan muncul kesimpulan yang mendalam secara komperhensif dari data hasil penelitian. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



_

⁴⁴ Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota dan diberikan kepada desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Karim selaku kepala desa Buttu Sawe terkait dana desa, beliau menyampaikan bahwa:

"Di desa Buttu Sawe ini alhamdulillah setiap tahunnya selalu mendapatkan dana desa sejak tahun 2019 saya menjabat sampai tahun ini selalu mendapatkan dana desa."

Hal tersebut juga diben<mark>ark</mark>an oleh Basri selaku kaur keuangan desa Buttu sawe, beliau juga menyampaikan bahwa :

"Tentunya iya, bahwa setiap desa yang ada dikabupaten pinrang yang sudah resmi desanya itu setiap tahunnya akan mendapatkan dana desa. Dan sekarang di desa buttu sawe ini selalu mendapatkan dana desa mulai beberapa tahun lalu sampai tahun 2023."

46 Basri, Kaur Keuangan , *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 26 September 2023

⁴⁵ Abdul Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 September 2023

Hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa di desa Buttu sawe ini setiap tahunnya selalu mendapatkan dana desa sampai di tahun 2023 ini masih mendapatkan dana desa yang berasal dari pemerintah.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan besaran dana desa yang diterima di setiap kabupaten khususnya di desa Buttu Sawe berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang-undang tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Karim selaku kepala desa Buttu Sawe, mengatakan:

"Pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe sudah berpedoman kepada peraturan yang telah di tetapkan. Dimana pemerintah Buttu Sawe sudah mengikuti proses penganggaran melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian untuk di dalam pengelolaan dana desa kami lakukan secara transparan dan akuntabilitas. Karena dapat dilihat dari keterbukaan dalam mengelola dana desa, seperti yang ada didepan kantor desa ada baliho APBDes dan papan informasi desa bahwa dana desa yang masuk di desa kita pada tahun ini sekian jumlahnya dan untuk pelaksanaan penggunaan dana tersebut kita lampirkan semua, kita paparkan semua disitu untuk diketahui oleh masyarakat banyak."

⁴⁷ Abdul Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, *Wawancara*di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 Sepetember 2023

Depan Kantor Desa Buttu Sawe sudah ada baliho APBDes yang menginformasikan tentang jumlah pendapatan yang diterima oleh desa Buttu Sawe dan juga mengenai penggunaan dana desa dipaparkan guna untuk diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Buttu Sawe menyampaikan informasi mengenai jumlah dana yang diterima yang akan dikelola dengan melalui media informasi seperti pemasangan baliho APBDes di depan kantor desa. Hal ini guna agar kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Prinsip transparansi adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminatif tentang pengelolaan keuangan dan penganggaran, pelaksanaan desa baik dalam perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas dengan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan khususnya pengelolaan dana pemerintah desa. desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan akuntabilitas dan transparansi maka akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan dipercaya dalam urusan keuangan. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan wawancara dengan Abdul Rasyid selaku sekretaris desa Buttu Sawe:

"Bahwa tata kelola penggunaan dana desa yang diterima sudah diatur dalam peraturan kementrian desa. Jadi penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada peraturan dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat di dalam peraturan tersebut. Dan peran pemerintah desa dalam

pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat terbuka tidak ada yang ditutuptutupi mengenai anggaran yang ada kita paparkan pada saat rapat, bahwa anggaran sekian jumlahnya untuk penggunaannya ini dan setelah itu kami bikin baliho yang dipasang di depan kantor desa, danada juga papan informasi itu semua bertujuan agar diketahui langsung oleh masyarakat supaya mereka tau kemana anggaran itu digunakan. Dan kami pemerintah desa Buttu Sawe selalu berusaha jujur dalam pengelolaan dana desa, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Dimana Kaur Keuangan desa selalu mencatat yang sebenar-benarnya. Dana desa yang dikelola selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan desa."

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa Buttu Sawe untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat terbuka. Anggaran yang dipaparkan dalam rapat semuanya disebutkan jumlah anggarannya dan penggunaannya. Sesuai dengan hasil rapat mengenai anggaran dan pelaksanaannya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur desa. Dan dalam mewujudkan pemerintahan yang jujur, pemerintah desa Buttu Sawes selalu berupaya jujur dalam melakukan semua kegiatan. Sesuai dengan peraturan Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, pemerintah desa Buttu Sawe telah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan penerimaan anggaran, pencatatan, pengelolaan sampai dengan pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut dibenarkan juga oleh tajuddin masyarakat desa Buttu Sawe:

"Begini dek, jadi untuk bentuk tranparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengadakan rapat, dan mereka juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana desa melalui papan informasi dan baliho yang ada di depan kantor desa sehingga kami masyarakat juga bisa mengetahui sekian dana desa yang diterima oleh desa Buttu Sawe."

⁴⁹ Tajuddin, Masyarakat Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe. Tanggal 5 September 2023

⁴⁸ Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 30 September 2023

Hal serupa juga dikatakan oleh Hamka selaku masyarakat desa Buttu Sawe, menyatakan bahwa :

"kalau itu ya kami juga di informasikan, pemerintah desa disini sudah terbuka dan transparan, di depan kantor desa itu dipasang baliho papan informasi. Jadi pemerintah desa Buttu Sawe terbuka sama kami sebagai masyarakat desa." ⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang ada di desa Buttu Sawe ini sudah bersifat transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilihat dari ke-transparan dan tanggungjawaban pemerintah desa Buttu Sawe dalam mengelola dana desa dengan memberikan penuh kepada masyarakat dengan memasangkan baliho papan informasi.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi sangat penting karena perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah menggunakan dan memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDes dan RKPDes yang merupakan hasil dari perencanaan. (Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018).

 $^{^{50}}$ Hamka, Masyarakat Desa Buttu Sawe,
 $\it Wawancara$ di Desa Buttu Sawe. Tanggal 12 Oktober 2023

Pada tahap perencanaan didahului dengan Musrembang. Musrembang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dari teori diatas menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Pertama pemerintah desa akan mengadakan musyawarah dengan masyarakat (Musrembang) untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat mengenai program kerja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenan. Kemudian akan dilaksanakan dan pembentukan RPJM dan RKP.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak kepala desa Buttu Sawe yaitu Abdul karim mengatakan bahwa :

"Bahwa di dalam perencanaan Dana Desa di Desa Buttu Saweada beberapa proses yang perlu dilalui untuk memperoleh. Untuk proses yang pertama ada yang kita sebut dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa) atau rencana jangka 5 tahun kedepan. Dimana didalam penyusunan RPJMDes kita adakan rapat bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, dan BPD. Kemudian kami lakukan musyawarah untuk merencanakan pembangunan jangkah menengah. Dalam hal ini kita masukan semua yang perlu dibiayai dalam desa atau di anggarkan. Terus yang kedua adalah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dimana RKPDes ini yaitu rencana jangka satu tahun kedepan. RKPDes ini ada dua tahap yaitu perencanaan dan penetapan. Artinya semua usulan dari masyarakat dimasuk kan dalam RKPDes kemudian sebagian usulan masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan anggaran yang masuk. Selanjutnya, usulan masyarakat dikerjakan secara bertahap." 51

Hal itu juga dibenarkan oleh Basri kaur keuangan Desa Buttu Sawe yang mengatakan bahwa :

"Sebelum akan dilaksanakannya perencanaan pembangunan kami akan adakan rapat terlebih dahulu guna membahas rancangan kegiatan. Yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala dusun,tokoh agama, dan BPD untuk melakukan musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut harus dibuatkan

-

⁵¹Abdul Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 September 2023

RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. RKPDes itu rencana kerja pemeritah desa yang jangka waktunya 1 tahun."⁵²

Sebagaimana juga yang juga dikatakan oleh Abdul Rasyid selaku sekretaris Desa Buttu Sawe bahwa :

"Perencanaan didasarkan pada permasalahan yang ada dilingkup masyarakat, diamana apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan disuatu desa yang dimulai dengan cara mengadakan forum musyawarah yang melibatkan masyarakat. Karena perencanaan tersebut dimulai dari bawah, dari masyarakat tingkat dusun. Dusun ketingkat desa dan begitupun perencanaan pembangunan desa yang berdasar pada RPJMDes, kemudian menetapkan RKPDes."

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang telah di musyawarahkan yang telah disepakati bersama akan dibuatkan RKPDes karena di dalam RKPDes termuat segala rencana kerja pemerintah desapada tahun anggaran. RKPDes disusun berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah. Setiap daftar usulan dipilih dan dipilih mana yang akan menjadi prioritas penganggaran pada tahun anggaran berjalan. RKPDes ini merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 tahun.

Didalam musyawarah proses perencanaan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memutuskan hal yang akan dilaksanakan dalam kegiatan. Hal tesebut betujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta di dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan di desa. Sehingga hasil dari kegiatan ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh tajuddin (masyarakat desa Buttu Sawe) :

"Yah sebelum melakukan rencana kegiatan pemerintah desa mengajak masyarakat untuk musyawarah tentang perencanaan pembangunan tentang

⁵³Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 30 September 2023

_

⁵²Basri, Kaur Keuangan, Wawancara di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 26 September 2023

kebutuhan yang diperlukan di Desa Buttu Sawe ini. Seperti kegiatan apa yang mau dilaksanakan atau yang mau dibangun."⁵⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Hamka (masyarakat desa Buttu Sawe):

"Awal perencanaan kami masyarakat desa diundang untuk menghadiri musyawarah desa di kantor desa untuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa, dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan usulan-usulan dan pemerintah desa menyampaikan program desa." 55

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dengan diadakannya forum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa yang melibatkan BPD, kepala dusun, tokoh agama, serta tokoh masyarakat untuk membahas usulan-usulan atau hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam membahas perencanaan yang akan dilakukan ke depannya dengan berdasar pada RPJMDes dan menetapkan RKPDes. Kegiatan ini dilakukan di kantor desa Buttu Sawe.

Berdasarkan hasil wawancara Abdul karim selaku kepala desa Buttu Sawe mengenai bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musyawarah, yaitu sebagai berikut:

"Untuk partisipasi masyarakat desa Buttu Sawe alhamdulillah sangat bagus seluruh masyarakat merespon dengan positif dengan adanya dana desa terbukti jika adanya kegiatan musyawarah yang dilaksanakan masyarakat desa Buttu Sawe sangat aktif dan antusias untuk mengikutinya." ⁵⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah dilihat dari prosedur dari perencanaannya yang melibatkan masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan

55Hamka, Masyarakat Desa Buttu Sawe, Wawancara di Desa Butu Sawe. Tanggal 12 Oktober 2023

⁵⁴Tajuddin, Masyarakat Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe. Tanggal 5 September 2023

⁵⁶Abdul Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Butu Sawe. Tanggal 18 September 2023

serta pemikiran untuk pembangunan dan menyangkut ekonomi masyarakat. Dan juga pemerintah desa mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik.

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana pemerintah telah melibatkan seluruh elemen masyarakat desa yang ada di desa Buttu Sawe seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, serta BPD dalam menyumbangkan ide, pemikiran sehingga proses perencanaan tersebut berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Musyawarah mengenai proses perencanaan dilakukan di kantor desa Buttu Sawe setiap bulan juli.

b. Pelaksanaan

Pelakasanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan nya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (Pemerintah Desa) untuk pelaksanaan pembangunan yang di danai dengan dana desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

Menurut Abdul Karim selaku kepala desa Buttu Sawe, mengatakan :

"Pemerintah desa Buttu Sawe dalam pelaksanaan kelola dana desa yaitu dengan memiliki tim pelaksana kegiatan dimana dalam pelaksanaanya pun pemerintah juga melibatkan masyarakat." ⁵⁷

⁵⁷Abdul Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 September 2023

_

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rasyid selaku sekretaris desa menyatakan bahwa :

"Sebelum melaksanakan kegiatan atau proyek dana desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu kita melaksanakan musyawarah dan setelah kita tetapkan daftar rincian rencana kerja itu kita sesuaikan mana yang lebih utama harus dilaksanakan." 58

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, karena pembangunan Desa Buttu Sawe yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama.

Pelaksanaan kegiatan di desa merupakan hal yang fundamental dan harus dibahas dan diputuskan melalui musyawarah atau rapat. Prinsip pelaksanaan kegiatan adalah swakelola desa. Artinya dikelola sendiri oleh masyarakat desa Buttu Sawe yang dipimpin oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Buttu Sawe:

a. Ketua : Syamsul Alam (Kasi Kesejahteraan)

b. Sekretaris : Basri, SE.MM (Ketua Karang Taruna Kec. Duampanua)

c. Anggota : M.Aris (Ketua LKD)

d. Anggota : Hasbi (Tokoh Masyarakat)

Penggunaan pendapatan dana desa di Desa Buttu Sawe digunakan dalam program kerja yang terealisasi di dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2022 terdapat 5 Bidang yaitu:

⁵⁸Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 30 September 2023

Tabel 4.5 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

Desa Buttu Sawe

K	Kode Rek		Uraian Kegiatan	Lokasi	Jumlah Anggaran
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Buttu Sawe	59.400.000,00
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Buttu Sawe	240.841.536,00
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Buttu Sawe	17.544.288,00
1	1	04	Penyediaan Operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan)	Buttu Sawe	139.172.862,00
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Buttu Sawe	43.800.00,00
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)	Buttu Sawe	5.000.000,00
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Buttu Sawe	7.500.000,00
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Buttu Sawe	8.700.000,00
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Buttu Sawe	1.310.000,00
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Buttu Sawe	1.550.000,00
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Buttu Sawe	1.200.000,00
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Buttu Sawe	4.400.000,00
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan)	Buttu Sawe	1.200.000,00
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Buttu Sawe	1.800.000,00
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		

	1	1	T	Γ	
2	1		Sub Bidang Pendidikan		219.841.250,00
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	Buttu Sawe	18.000.000,00
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana/Alat Peraga	Buttu Sawe	201.841.250,00
2	2		Sub Bidang Kesehatan		194.508.538,00
2	2	01	Penyeleggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	Buttu Sawe	37.200.000,00
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu	Buttu Sawe	11.196.000,00
2	2	04	Penyeleggaraan Desa Siaga Kesehatan	Buttu Sawe	4.122.938,00
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana Posyandu	Buttu Sawe	141.989.000,00
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		199.677.550,00
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha tani	Buttu Sawe	182.724.600,00
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Buttu Sawe	16.952.950,00
2	4		Sub Bidang Kawasan pemukiman		24.684.750,00
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Buttu Sawe	24.684.750,00
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		1.200.000,00
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)	Buttu Sawe	1.200.000,00
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		25.000.000,00
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Buttu Sawe	5.000.000,00
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Buttu Sawe	20.000.000,00
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		94.161.500,00

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

			JUMLAH		1.912.852.274,00
5	2	0	Penanganan Keadaan Darurat	Buttu Sawe	590.400.000,00
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		590.400.000,00
4	5	03	Pengadaan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Buttu Sawe	14.000.000,00
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Buttu Sawe	14.560.000,00
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Buttu Sawe	1.400.000,00
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		29.960.000,00
3	4	03	Pembinaan PKK	Buttu Sawe	13.806.500,00
3	3	06	Pembinaan Karangtaruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Buttu Sawe	7.000.000,00
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Buttu Sawe	4.500.000,00
3	1	01	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	Buttu Sawe	68.855.000,00

c. Penatausahaan

Pelaksanaan penatausahaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 kepala desa dalam melaksanakaan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa.

Penatausahaan Desa Buttu Sawe secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penatausahaan, wawancara dengan kepala desa Buttu Sawe dan sekretaris desa beliau mengatakan bahwa :

"Jadi penatausahaan itu merupakan proses penginputan penerimaan dan pengeluaran desa. Dimana penginputan ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Proses penatausahaan ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa baik panjar maupun definitive." (Abdul Karim)

"Penatausahaan pendapatan dan belanja desa kami menggunakan buku bank desa. Kemudian untuk pencairan dana desa dalam rekening desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Nah setiap belanja dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa yang disertai bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan." (Abdul Rasyid)

Adapun yang diungkapkan oleh Basri selaku Kaur keuangan, mengatakan:

"Sekarang kami gunakan aplikasi Siskeudes, lewat aplikasi Siskeudes ini tiap kali ada pemasukan dan pengeluaran maka dilaporkan oleh admin siskeudes. Maka di aplikasi itu langsung muncul dana yang digunakan untuk apa saja. Dan kebetulan yang mengelola siskeudes ini adalah saya sendiri. Dan di dalam penatahusaan kami ada dua pelaporannya yaitu panjar dan definitive, maksud dari definitive itu adalah dikerjakan dulu baru kita tarik atau cairkan anggaraannya. Sedangkan panjar itu kadang kita cabut anggarannya atau kita cairkan dulu terus baru kita laksanakan, ini tergantung keadaan bagaimana kegiatan itu."

Aplikasi sistem keuangan desa atau disebut juga Siskeudes adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa realisasi APBDes. Aplikasi siskeudes mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keungan desa, dirancang secara terintegrasi, serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan menggunakan aplikasi siskeudes tersebut dapat membantu pemerintah desa.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entry data atau memasukkan data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan telah sesuai dengan peraturan yang ada bahwa pemerintah desa dalam penatausahaan

 $^{^{59}\}mathrm{Abdul}$ Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, Wawancaradi Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 September 2023

⁶⁰Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 30 September 2023

⁶¹Basri, Kaur keuangan, Wawancara di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 26 September 2023

pengeloaan dana desa di Desa Buttu Sawe sudah berdasarkan prosedur dan atau pemerintah untuk setiap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukaan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab.

Pertanggungjawaban merupakan suatu poin penilaian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Pelaporaan dan pertanggungjawaban dana desa merupakan proses akhir yang mempunyai peran penting dalam situasi instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memeberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Mengenai proses pelaporan yang dikatakan oleh Abdul Rasyid selaku sekretaris desa, bahwa:

"Dalam proses ada beberapa pelaporan yang terdiri dari pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa, dan ada juga bentuk penjabaran perubahan anggaran pendapatan belanja. Dan itu semua kita melaporkan pertanggungjawaban setiap tahapnya melalui kecamatan kemudian ditembuskan ke kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat."

-

⁶²Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu Sawe, Wawancara di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 30 September 2023

Lebih lanjut dijelaskan oleh basri selaku kaur keuangan desa Buttu Sawe tentang pelaporan anggran dana desa, bahwa:

"Setelah penatausahaan di laksanakan dan kami laksanakan kagiatannya, baru kami laporkan kagiatannya melalui LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dan ada juga Laporan keuangan atau laporan realisasi APBDes kami laporkan. Setelah itu kami bawa ke kecamatan dan juga diperikasa oleh Inspektorat dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa)." ⁶³

Kemudian hasil wawancara dengan Abdul Karim selaku Kepala Desa Buttu Sawe terkait dengan pertanggungjawaban, menyatakan bahwa"

"Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting. Dikatakan penting karena pertanggungjawaban tersebut akan dijadikan evaluasi bagi kami perangkat desa atau pengelola dana untuk membenahi program kegiatan yang dilaksanakan. Tingkat kejelasan pertanggungjawaban dilihat sebagai penilaian terhadap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di Desa Buttu Sawe. Setiap kali kegiatan yang dilaksanakannya harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan atau dipakai. Selain itu dengan adanya pertanggungjawaban dapat diketahui apakah pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan rancangan kegiatan yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan awal yang mencapai kesepakatan bersama. Menurut saya, proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ini sudah dilaksanakan secara akuntabilitas."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana desa pada Desa Buttu Sawe yang dilakukan oleh perangkat desa yang disampaikan ke kabupaten melalui camat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Dalam pelaporan tersebut mencakup realisasi APBDes. Dan sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas serta transparansi yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa dan diinformasikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat dapat mengetahui.

Dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pelaksanaan pemerintah

-

⁶³Basri, Kaur Keuangan, Wawancara di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 26 September 2023

desa harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dimana semua hal yang terkait dengan penyeleggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh masyarakat, camat, Inspektorat dan PMD. Laporan pertanggungjawaban ini juga dipegang oleh kepala desa dan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap badan musyawarah desa dan kepada masyarakat.

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi yang memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi atau keterbukaan memberikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Pemerintah desa dan perangkat desa Buttu Sawe dalam merealisasikan prinsip transparansi ini dilakukan dengan beberapa bentuk seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa, mensosialisasikan laporan dana desa kepada masyarakat. Sifat transparansi yang dimiliki oleh pemerintah desa tentu akan memberikan nilai positif dari masyarakat terkait kepemimpinan kepala desa dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakatnya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan harus benar-benar dilaporkan, dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawarah Desa dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Dari pengamatan peneliti terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe sudah akuntabel. Sesuai penjelasan diatas bahwa akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik anggaran, pemerintah desa Buttu Sawe telah melakukan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dan setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran. Dimulai dari penyusunan dan penetapan RPJM Desa yang memuat rencana pembangunan desa selama 5 tahun, kemudian perencanaan, penyusunan dan penetapan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk pembangunan 1 tahun serta pelaksanaan dari RPJM Desa dan RKP Desa dilaporkan pada setiap tahunnya.

Jadi, Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Sehingga,

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe berdasarkan hasil keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Tabel 4.6 Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Buttu Sawe
Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI APBDes PEMERINTAHAN DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

ef ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/KURANG (RP)
		2
1.911.978.000,00	1.908.338.736,00	3.639.264,00
912.558.000,00	912.558.000,00	0,00
999,420.000,00	995.780.736,00	3.639.264,00
5.000.000,00	300.950,00	4.699.050,00
1.916.978.000,00	1.908.639.686,00	8.338.314,00
545.058.750,00	533.418.686,00	11.640.064,00
670.043.538,00	664.912.088,00	5.131.450,00
95.355.000,00	94.161.500,00	1.193.500,00
29.600.000,00	29.600.000,00	0,00
590.400.000,00	590.400.000,00	0,00
1.930.817.288,00	1.912.852.274,00	17.965.014,00
1.730.017.200,00	1.712.032.274,00	17.703.014,00
	1.911.978.000,00 912.558.000,00 999.420.000,00 5.000.000,00 1.916.978.000,00 545.058.750,00 670.043.538,00 95.355.000,00 29.600.000,00 590.400.000,00	ef (RP) (RP) 1.911.978.000,00 1.908.338.736,00 912.558.000,00 912.558.000,00 999.420.000,00 995.780.736,00 5.000.000,00 300.950,00 1.916.978.000,00 1.908.639.686,00 545.058.750,00 533.418.686,00 670.043.538,00 664.912.088,00 95.355.000,00 94.161.500,00 29.600.000,00 29.600.000,00 590.400.000,00 590.400.000,00

SULPLUS/(DEFISIT)	(13.839.288,00)	(4.212.588,00)	(9.626.700,00)
PEMBIAYAAN		0,00	13.839.288,00
Penerimaan Pembiayaan	13.839.288,00	0,00	13.839.288,00
PEMBIAYAAN NETTC SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		(4.212.588,00)	4.212.588,00
	13.839.288,00 13.839.288,00		
	0,00		S
			Ħ

2. Dampak Dana Desa Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat

Peningkatan sosial ekonomi adalah suatu keadaan adanya upaya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa Buttu Sawe sangat berefek terhadap masyarakat. Dengan adanya dana desa akan sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan dana desa membantu keuangan desa untuk membangun swakelola baik fisik maupun nonfisik. Dan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan tani, rabat beton jalan kampong atau jalan desa, pembangunan saluran irigasi, dan lain-lain dilakukan oleh masyarakat Buttu Sawe itu sendiri. Dengan demikian, swakelola ini dapat meningkatkan ekonomi

masyarakat dari segi pendapatan dan juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilakukan.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa itu sendiri. Dan harus mampu menunjang segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut agar semakin maju. Fasilitas tersebut seperti akses jalan ke lahan yang dinamakan dengan jalan tani, rabat beton jalan kampung atau jalan desa, saluran irigasi, serta pembangunan infastruktur lainnya. Dan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Abdul Karim selaku kepala desa, mengatakan bahwa:

"Program pembangunan di desa tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk pembangunan yang sudah terlaksana yaitu pembangunan jalan tani, rabat beton jalan desa, serta saluran irigasi.Pembangunan jalan ini bertujuan untuk membantu atau mempermudah masyarakat dalam membawa hasil panen nya. Sedangkan untuk saluran irigasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penyaluran air ka lahan pertanian. Dengan adanya pembangunan tersebut tentunya juga berdampak pada hasil panen atau perekonomian masyarakat. Namun hasil perekonomian masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya seperti hama dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Tujuan dan harapan dengan adanya pembangunan ini di Desa Buttu Sawe tentunya memudahkan masyarakat dan akan berdampak pada hasil perekonomian masyarakat. Karena sudah adanya kemudahan seperti terkendalanya dalam proses pengangkutan pupuk ke sawah terlebih lagi jika jaraknya jauh dan tidak menggunakan kendaraan tetapi sekarang sudah dimudahkan dengan adanya jalan yang dibangun. Selain itu peningkatan perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan yang diberikan pemerintah Buttu Sawe seperti peneriman bansos. "64"

Pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa melalui wawancara di atas juga sesuai dengan pernyataan haris selaku masyarakat desa Buttu Sawe, yang mengatakan bahwa:

-

 $^{^{64}\}mathrm{Abdul}$ Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, Wawancara di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 September 2023

"Yahh untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat membantu masyarakat terutama para petani dalam melakukan aktivitas seharihari, seperti dengan dibangun nya jalan tani. Sehingga saya dapat dengan mudah pergi ke sawah saya yang jarak tempuhnya cukup lama karena hanya berjalan kaki tapi sekarang tidak lagi karena sudah bisa menggunakan kendaraan. Dan untuk hasil perekonomian juga sudah ada peningkatan dari sebelumnya."

Hal serupa juga disampaikan oleh sulpi selaku masyarakat Desa Buttu Sawe, mengatakan bahwa:

"Begini nak, dulunya banyak jalanan yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki, tapi dengan adanya perubahan perbaikan jalan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Apalagi kan di desa Buttu Sawe ini mayoritas penduduk desa nya itu pekerjaannya petani dan juga pedagang. Dengan adanya kemudahan seperti ini tentunya sangat membantu perekonomian masyarakat."

Paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan yang telah dilakukan oleh dengan menggunakan dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam hal memudahkan masyarakat untuk membawa hasil panen dari kebun ke pasar, akses untuk ke sawah juga sudah lebih baik dengan adanya jalan tani, dan juga memudahkan masyarakat dalam pengairan sawah karena adanya saluran irigasi. Dengan adanya kemudahan dan manfaat tersebut tentunya sangat berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Yang dapat dirasakan masyarakat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Buttu Sawe dengan menggunakan Dana Desa.

Selain itu, dampak dari adanya dana desa ini juga berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat. Di desa Buttu Sawe mayoritas pekerjaannya adalah petani, wiraswasta sebagian buruh, dan pedagang.

-

2023

2023

⁶⁵Haris, Masyarakat Desa Buttu Sawe, Wawancara di Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 Oktober

⁶⁶Sulpi, Masyarakat Desa Buttu Sawe, Wawancara di Desa Buttu Sawe. Tanggal 27 Oktober

Masyarakat yang pekerjaannya petani ada yang memiliki lahan sendiri dan ada juga bekerja menggarap lahan orang lain dan sebagain kecil buruh bangunan. Tentunya pekerja petani dan buruh serta pedagang masih harus diperhatikan karena minimnya pendapatan rumah tangga. Tetapi, sejak adanya program dana desa di desa Buttu Sawe sudah menunjukkan adanya manfaat dalam menambah pendapatan masyarakat, karena adanya pembangunan seperti jalan tani, saluran irigasi, dan pembangunan jalan di desa.

Tabel 4.7 Pendapatan Rata-rata masyarakat desa Buttu Sawe

No	Pekerjaan	Pendapatan sebelum adanya pembangunan	Pendapatan setelah adanya pembangunan
1	Hamka (Petani penggarap)	1.000.000/Bulan	1.500.000/Bulan
2	Tajuddin (Petani)	1.500.000/Bulan	1.800.000/Bulan
3	Haris (Buruh)	700.000/Bulan	1.500.000/Bulan
4	Sulpi (Pedagang)	500.000/Bulan	1.000.000/Bulan

Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang dialami oleh masyarakat mulai dari buruh, petani, dan pedagang. Peningkatan pendapatan yang dialami oleh masyarakat yang bekerja sebagai buruh dikarenakan adanya setiap program pembangunan yang ada di desa selalu melibatkan masyarakat desa terutama yang paham pada bidang bangunan. Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani dengan meningkatnya pendapatannya di sebabkan karena adanya akses jalan tani sehingga itu bisa memudahkan masyarakat dalam

mengeluarkan hasil taninya, dan adanya pembangunan saluran irigasi yang juga memudahkan petani disaat musim kemarau. Kemudian, meningkatnya pendapatan yang dirasakan oleh pedagang dikarenakan adanya akses jalan yang sudah bagus sehingga dapat memudahkan mereka untuk membawa barang dagangan nya.

Sehingga, dapat dikatakan secara sederhana bahwa perekonomian masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan sebelum adanya pembangunan yang telah memadai. Adanya peningkatan perekonomian dapat memberikan informasi sejauh mana aktivitas perekonomian yang menghasilakan tambahan pendapatan bagi masyarakat tersebut. Dari adanya beberapa pembangunan yang telah dibahas diatas, itu semua termasuk sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan di masyarakat tetapi tidak secara serta-merta dibangun secara bersamaan melainkan butuh beberapa waktu ini bisa terealisasikan.

Adapaun wawancara kepada Suriati masyarakat desa Buttu Sawe terakait kehidupan Ekonomi dengan adanya dana desa, yang menyatakan bahwa:

"Pemerintah desa di desa Buttu sawe sangat memperhatikan dan peduli dengan masyarakat kecil seperti kami. Saya mendapat bantuan berupa Bansos dari desa yang berupa sembako.Dengan adanya bantuan berupa Bansos yang setiap tiga bulan saya dapatkan Alhamdulillah dapat membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga." 67

Jadi, dalam pengelolaan dana desa dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di Desa Buttu Sawe sudah berpengaruh sangat baik. Yang dapat dilihat dari perkembangan kegiatan dalam perekonomian dan berbagai manfaat serta kemudahan yang diperoleh masyarakat dari pembangunan serta adanya Bantuan Sosial bagi yang kurang mampu yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan

 $^{^{67} \}mathrm{Suriati},$ Masyarakat Desa Buttu Sawe, Wawancara di Desa Buttu Sawe. Tanggal 1 November 2023

Dana Desa yang sangat membantu masyarakat dan dalam melakukan aktivitas seharihari. Hal ini tentunya dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di Desa Buttu Sawe.

Dengan adanya dana desa, pemerintah dapat melaksanakan rencana yang telah disepakati bersama oleh pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga lembaga yang ada di Desa Buttu Sawe. Peran dana desa dinilai sangat bermanfaat dalam peningkatan sosial ekonomi yang terdapat dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Buttu Sawe. Setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai mengalir lebih mudah dengan dana desa karena pekerjaan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan tani, rabat beton jalan kampong atau jalan desa, saluran irigasi. Dan pemberdayaan masyarakat desa seperti adanya peningkatan produksi tanaman pangan yang dapat diselesaikan dengan uang tersebut.

Wawancara yang dilakukan kepala desa Buttu Sawe yaitu Abdul Karim menyatakan bahwa:

"Dalam meningkatkan berbagai komponen secara bertahap dan untuk kepentingan berbagai sektor, maka pemerintah desa mengajak dan mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan. Salah satu contohnya adalah di dalam pembangunan jalan desa, jalan tani serta saluran irigasi."

Seperti yang diungkapkan juga oleh Kaur Keuangan Desa, yaitu Basri beliau mengatakan:

"Dampak pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dapat membantu lingkungan untuk mendapatkan fasilitas dan akses yang dibutuhkan."

_

 $^{^{68}}$ Abdul Karim, Kepala Desa Buttu Sawe, Wawancaradi Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 September 2023

⁶⁹Basri, Kaur Keuangan, Wawancara di Kantor Desa Buttu Sawe. Tangga 26 September 2023.

Hal ini juga diungkapkan oleh Abdul Rasyid selaku sekretaris desa, beliau mengatakan bahwa :

"Dampak dari adanya dana desa ini ya bisa dikatakan adanya peningkatan ekonomi masyarakat dengan hasil produksi yang bisa sesuai dengan harapan bagi masyarakat desa Buut Sawe."

Hasil wawancara diatas tentang dampak dari pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan bahwa masuknya dana desa dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Dampak dari adanya dana desa ini dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan di desa Buttu Sawe, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program-program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa Buttu Sawe. Setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan berjalan dengan lancar, dalam artiannya pembangunan terus meningkat dan berjalan membenahi infastruktur desa seperti jalan desa, jalan tani serta saluran irigasi yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki dan dibangun. Beberapa jalan desa di desa Buttu Sawe yang tadinya keterbatasan sekarang meningkat menjadi jalan yang sudah di cor beton.

Wawancara yang dilakukan bersama Suriati selaku masyarakat desa Buttu Sawe, beliau selaku pelaku ekonomi yang menerima manfaat dengan adanya dana desa menyatakan bahwa :

"Adanya dana desa ini telah bermanfaat bagi peningkatan sosial ekonomi yakni mengatasi masalah sosial masyarakat. Kami merasa beban hidup sehari-

⁷⁰Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu Sawe, Wawancara di Kantor Desa Buttu Sawe. Tanggal 30 September 2023

hari telah diringankan dengan dibentuknya program dana desa yang membantu masyarakat miskin seperti adanya Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa sembako. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa kebutuhan materinya telah terpenuhi."

Hal ini juga disampaikan oleh Haris selaku masyarakat desa Buttu Sawe, mengatakan bahwa :

"Banyak manfaat yang diberikan oleh dana desa salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana desa seperti saluran irigasi dan jalan, irigasi ini sangat membantu petani. Pembangunan sarana dan prasarana yang telah benar-benar dioptimalkan, sehingga saat musim kemarau masyarakat disini tidak bingung lagi untuk mengairi sawah, jadi mengurangi kemungkinan kegagalan panen." 12

Kemudian, hal serupa juga dikatakan oleh Hamka selaku masyarakat Desa Buttu Sawe, beliau mengatakan bahwa :

"Jika ada pembangunan seperti irigasi dan jalan itu selalu melibatkan masyarakat sini. Jadi sejak adanya pembangunan yang diselenggarakan desa yang melibatkan masyarakat setempat, masyarakat banyak yang ikut andil setidaknya ada penghasilan tambahan yang di dapat." ⁷³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang sudah diselesaikan proses pembangunan nya dengan tujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian mereka. Dengan keberadaan pembangunan tersebut yang ada di desa Buttu Sawe membuat masyarakat merasakan pemberdayaan ekonominya. Dan di dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah ada program-program yang dimana ini sangat membantu masyarakat, melalui bantuan yang salah satunya disalurkan kepada masyarakat desa Buttu Sawe yaitu Bantuan Sosial (Bansos).

⁷²Haris, Masyarakat Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe. Tanggal 18 Oktober 2023

 $^{^{71}}$ Suriati, Masyarakat Desa Buttu Sawe,
 $\it Wawancara$ di Desa Buttu Sawe. Tanggal 1 November 2023

⁷³Hamka, Masyarakat Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe. Tanggal 12 Oktober 2023

Tabel 4.8 Dampak Peningkatan Sosial Ekonomi di Desa Buttu Sawe

No.	Dampak Peningkatan Sosial ekonomi	
1	Pembangunan Jalan Tani	
2	Pembangunan Jalan Desa	
3	Pembangunan Saluran Irigasi	
4	Bantuan Sosial (Bansos)	

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dampak dari adanya dana desa terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat ada beberapa point yaitu :

- Pembangunan Jalan Tani, adanya pembangunan ini dapat memudahkan masyarakat karena akses untuk ke sawah juga sudah lebih baik dengan adanya jalan tani.
- 2. Pembangunan Jalan Desa, adanya perbaikan jalan di desa buttu sawe sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti dalam hal memudahkan masyarakat untuk membawa hasil panen dari kebun ke pasar.
- 3. Pembangunan Saluran Irigasi, adanya saluran irigasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengairi persawahan mereka ketika musim kemarau sehingga adanya saluran irigasi sangat membantu dan dapat menurunkan kemungkinan gagal panen.
- Bantuan Sosial (Bansos), adanya bantuan ini yang disalurkan kepada masyarakat sangat membantu dalam perekonomian mereka yang kurang mampu.

Dengan adanya dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung dalam meningkatkan pembangunan di desa dan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan diberikannya dana desa di dalam peningkatan sosial ekonomi yang akan menjadikan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan sekarang setelah adanya dana desa peningkatan sosial ekonomi masyarakat desa Buttu Sawe dapat meningkat melalui pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe sudah berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negeri No 113 Tahun 2004 dimana dalam proses penganggarannya melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe sudah diawalai dengan melakukan kegiatan musyawarah yang melibatkan masyarakata dalam membuat keputusan dan perencanaan keguatan yang akana dilakukan. Kemudian dalam tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, karena pembangunan Desa Buttu Sawe yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama. Dan untuk dalam tahap penatausahaan ini juga telah sesuai dengan peraturaan yang ada bahwa pemerintah desa dalam penatausahaan pengeloaan dana desa di Desa Buttu Sawe sudah berdasarkan prosedur dan atau pemerintah untuk setiap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan mekanisme dan unsur akuntabilitas serta transparansi yang ada. Sehingga pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang telah mengikuti aturan teknis yang telah diatur dalam peraturan menteri serta dengan menggunakan asas transparansi, akuntabilatas , dan partisipasi. Sifat transparan pemerintah desa Buttu Sawe dalam memberikan informasi terkait dana desa Buttu Sawe untuk dapat menguatkan dan kepercayaan dan keberhasilan dalam pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa Buttu Sawe. Dari semua pengelolaan dana desa yang dilakukan, pemerintah desa Buttu Sawe tetap mempercayakan segala sumbangsih pikiran untuk kepentingan desa dan masyarakat kepada masyarakat itu sendiri, dengan menghadirkan masyarakat dalam rapat bersama jajaran pemerintah desa Buttu Sawe.

2. Dampak Dana Desa terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat di desa Buttu Sawe sangat berpengaruh dan telah mengalami peningkatan dikarenakan telah terpenuhinya indikator pembangunan ekonomi diantaranya adanya infastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, dan meningkatnya pendapatan penduduk. Karena dengan adanya pembangunan serta pemberdayaan yang dilaksanakan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan dirasakan dampak peningkatan pendapatan masyarakat dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan desa. Dampak adanya dana desa di dalam peningkatan sosial. Serta melalui program Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat Desa Buttu Sawe sebagai bentuk upaya dalam membantu masyarakat desa yang kurang mampu.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut :

- 1. Pemerintah desa Buttu Sawe harus terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat daripengelolaan dana ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semuamasyarakat desa Buttu Sawe. Dan setiap program-program yang dilaksanakan harus benar-benar diarahkan demi kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan pemerataan tanpa adanya ketimpangan sosial.Serta perlunya keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses perencanaan program Dana Desa sehingga program yang dilaksanakandapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.
- 2. Diharapkan kepada masyarakat desa Buttu Sawe untuk selalu ikut serta bersama pemerintah desa Buttu Sawe dalam menjaga dan melestarikan hasil pembangunan guna digunakan dalam waktu jangka panjang untuk kenaikan bersama dalam kehidupan dan aktivitas ekonomi lainnya.

PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdurrachaman, Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan, (Jakarta:PT.Pradnya Pramita, 1991
- Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Akbar Prayoga, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada 3 desa di Kecamatan Muara Payung kabupaten Lahat)'. (Skripsi sarjana : Jurusan Akuntansi: Palembang, 2019).
- Arikunta, Suharsimi. 'Pengelolaan Kelas dan Siswa', (Jakarta: CV. Rajawali, 1998),
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002).
- Ashari, Agus. Dan Jumardi. 'Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.* Vol. 6 No.1 (2021).
- Aziza, Nor Aufa.dan Selamat Riadi 'Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatka Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala'. *Jurnal Geografika*. Vol. 2 No. 1 (2021).
- Azwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998).
- Basrowi dan Siti Juariyah, 'Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.' *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 7 No. 1 April 2017.
- Bawono, Icuk Rangga. dan Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Bungis, Burhan. *Analisis data Penelitian Kualitatif, Pemahaman dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwando. 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, 2014)

- Damsar, Indriyani. 2016. Pengantar Sosiologi Ekonomi. (Jakarta: Kencana)
- Daryanto. 1997. Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo).
- Dewi, Icha Shintia. 'Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam'. (Skripsi Sarjana: *Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2019).
- Dikjen PPMD, *Pokok-pokok Prioritas Penggunaan Dana Desa* Tahun 2015, Permendesa No.B 2016
- Fatah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif teori & prakti,k (Jakarta: Bumi Aksara)
- Herujito, Yayat M. 2006. Dasar-dasar Manajemen. (Jakarta: Grasindo)
- Hidayat, Rahmat. dan H. Chandra Wijaya. 2017. Ayat-ayat Al-qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam, (Medan: LPPPI)
- http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa (Diakses, 22 februari 2023)
- Indriyani, Irma. 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru'. (Skripsi: *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan. 2019).
- Kasrian, Moh. Metode Penelitian Kualitatif, Cet.II (UIN Maliki Press, 2010).
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)
- Khatimah, Husnul. 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)'. (Skripsi Sarjana: *Jurusan Ekonomi Syariah*, 2020).
- Martoyo, Susilo. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*.(Yogyakarta: BPEE, 1988).
- Martoyo, Susilo. *Pengetahuan Dasar Manejemen dan Kepemimpinan*.(Yogyakarta: BPEE, 1988).
- Marzuki. Metodologi Riset. (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),

- Munifa, Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Ptpn Xi Pabrik Gula Padjarakan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Skripsi*, 2013.
- Paul A Samuelson & William D Nordhaus, *Economics International Edition*, (Singapore Tien Wah Press, 1989).
- Rachmawati, Imami Nur. 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif': wawancara, (*Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, 2017).
- Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif.(Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33, 2018).
- Rijali, Ahmad.(Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33, 2018).
- Rosidi, Imron. Karya Tulis Ilmiah. (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011).
- Ruru, Novita. Lintje Kalangi, dan Novi S.Budiarso. 'Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten MInahasa Utara)'. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.* 2017.
- Saefullah, U. Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Saibani. A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta, Media Pustaka. 2014)
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. (Makassar: Masagena Press, 2011)
- Sari, Hikmah Eka Purnama. Erwin Resmawan, dan Anwar Alaydrus. 'Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sebakung Kecamatan Longkali Kabupaten Paser'. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7 No. 2.
- Shadily Hassan, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Sholahudin. M, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Soekanto, Soerjono, 1983. Kamus Sosiologi. (Jakarta: CV. Rajawali)
- Sofianto.Arif. 'Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan'. *Badan perencanaan Pembangunan Daerah*.2017.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19
- Suhaenah Suparno A. *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Sulastri, Nova. Skripsi: 'Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna'. (*Kendari, Universitas Haluoleo*. 2016).
- Sule, Erni Tisnawati. dan Kurniawan Saefullah, 2009. *Pengantar Manjemen*, (Jakarta: Kencana Perdana MediaGoup,).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Syafarudin dan Irwa Nasution. 2005. *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta: Quatum Teaching,),
- Syafri, Sofyan. *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Terry dan Geoge R. 2012. Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarat : Bumi Aksara)
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (*Makalah dan Skripsi*), (Parepare: IAIN Parepare, 2020),
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 "Tentang Desa".
- Yustisia, Tim Visi. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta: Visimedia,).
- Zunaidi Muhammad, 'Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi Dan Pembangunan Pasar Modern'. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3 No. 1, 2013.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA : ANUGRAH PRATIWI

NIM : 19.3400.028

FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

PRODI : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

JUDUL : PENGELOLAAN DANA DESA DALAM

PENINGKATKAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

DESA BUTTU SAWE, KEC.DUAMPANUA,

KAB.PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pemerintah Desa

- 1. Apakah desa Buttu sawe setiap tahun mendapatkan dana desa?
- 2. Bagaimana proses pengelolaan dana desa dan siapa saja yang terlibat di dalam proses tersebut ?
- 3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
- 4. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di desa Buttu sawe dan apakah dilakukan secara terbuka ?

- 5. Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe?
- 6. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe ?
- 7. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait pengelolaan dana desa?
- 8. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa?
- 9. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Buttu Sawe ?
- 10. Program-program apa saja yang di danai oleh dana desa dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat ?
- 11. Dari program-program tersebut, siapa yang menjadi kelompok target/sasarannya?
- 12. Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa, menurunkah atau meningkat?

Wawancara untuk masyarakat

- 1. Apakah pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan?
- 2. Apakah dalam perencanaan pengelolaan dana desa, kepala desa mengadakan musyawarah ?
- 3. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
- 4. Apakah ibu/bapak pernah menerima bantuan dari dana desa, jika pernah bantuan seperti apa yang diterima?
- 5. Menurut ada, apakah dana desa ini berpengaruh terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang ada di desa Buttu Sawe ini?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pare-pare, 12 Juli 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. NIP: 196804041993031005

Afidatul Asmar, M.Sos. NIP: 199103262019031005

SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN



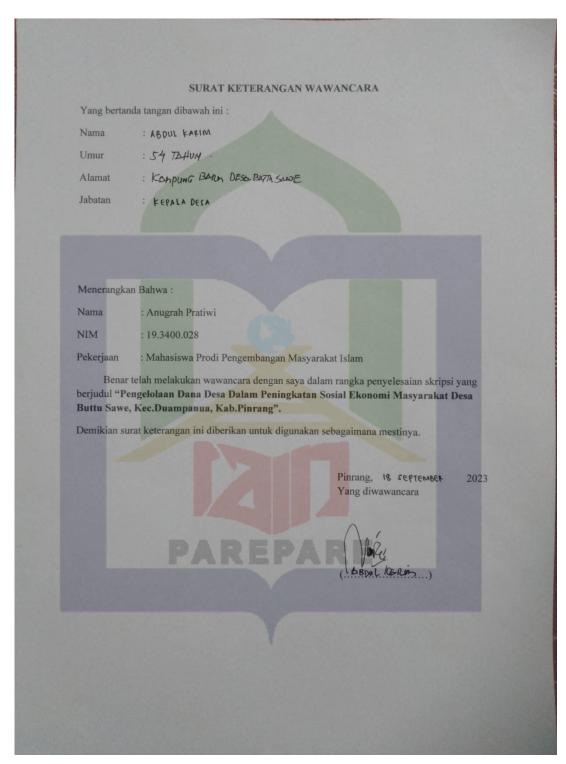
SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

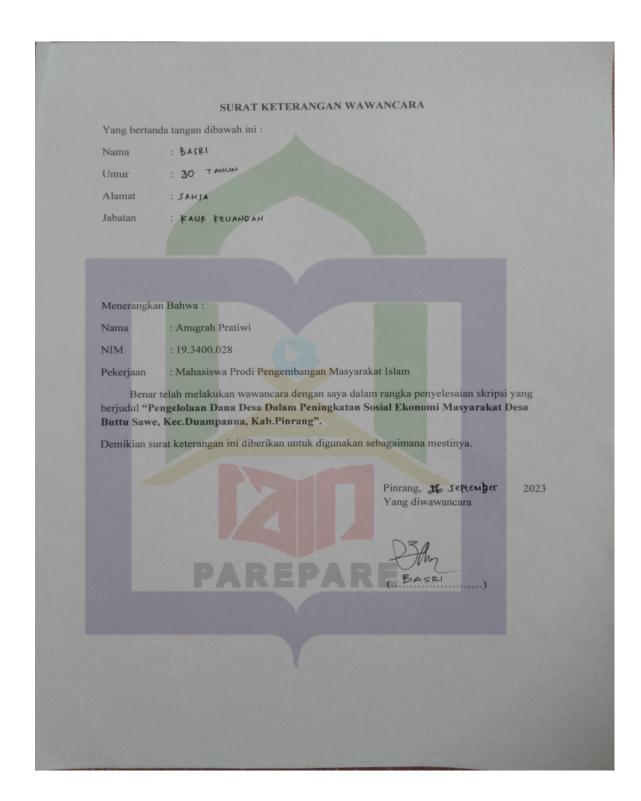


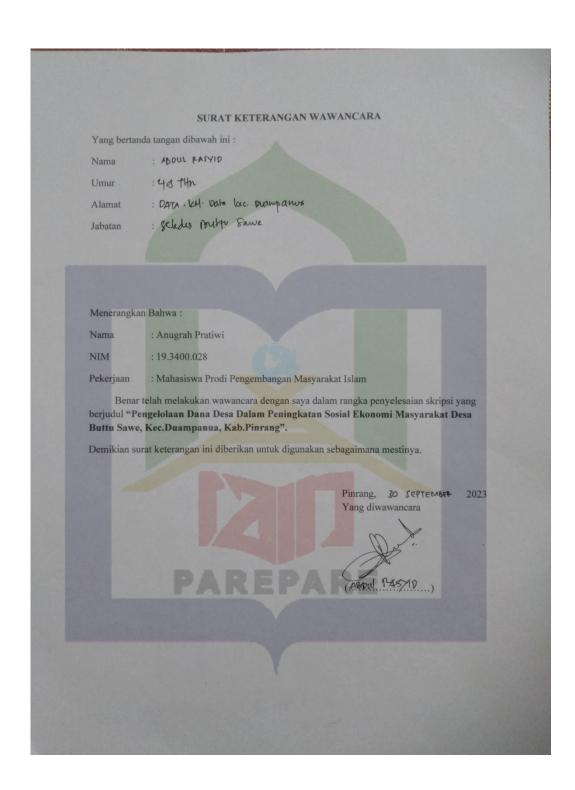
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

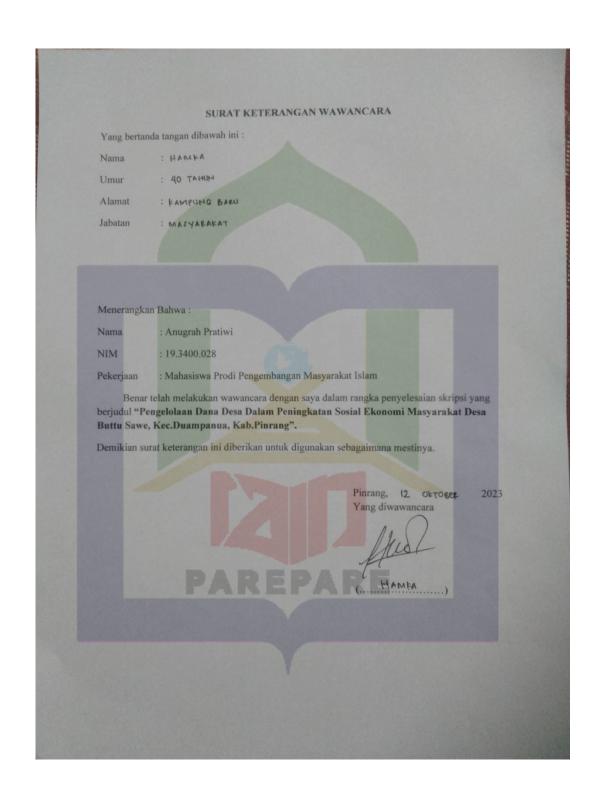


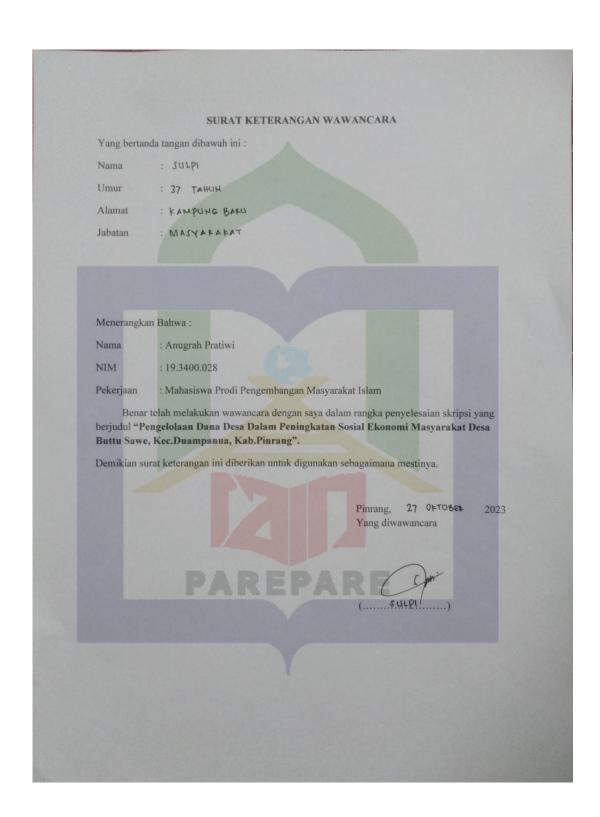
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

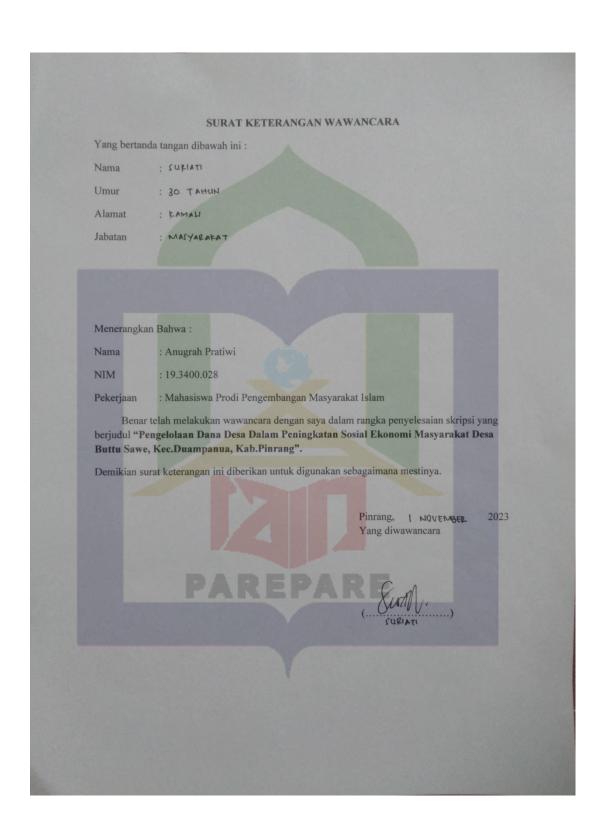


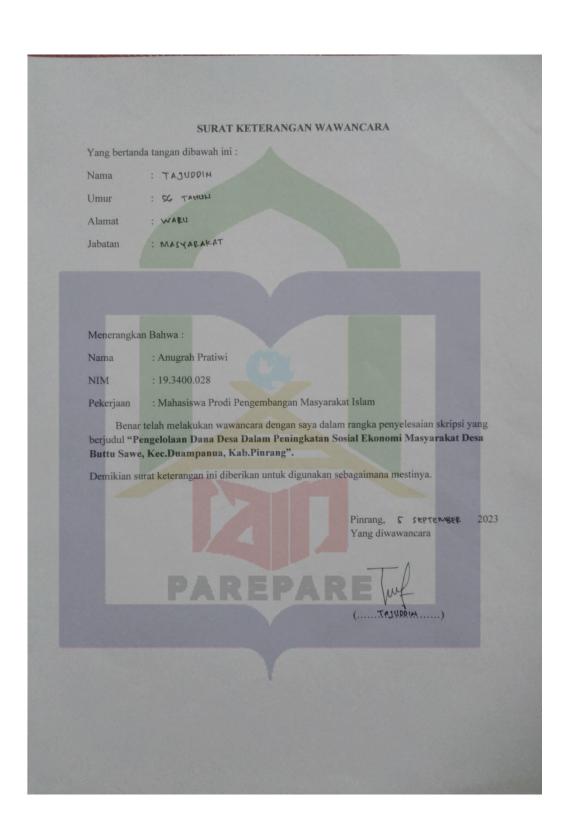


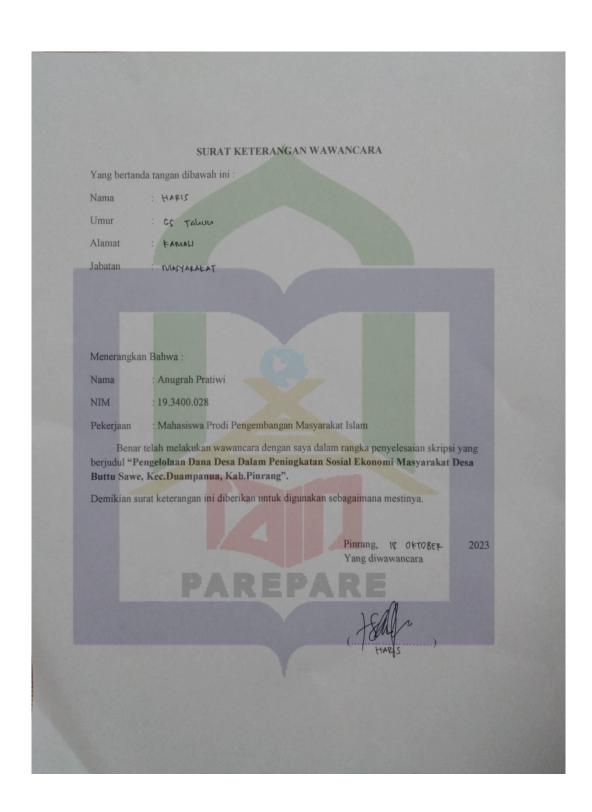




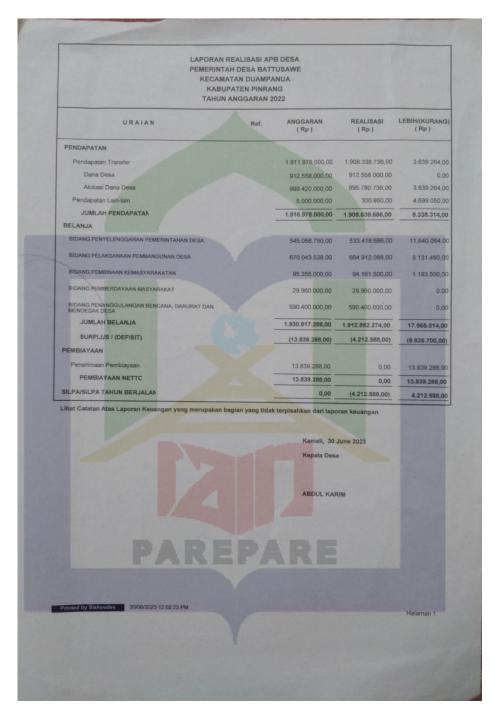








LAPORAN REALISASI APB DESA 2022



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Abdul Karim (Kepala Desa Buttu Sawe)



Wawancara dengan Abdul Rasyid (Sekertaris Desa Buttu Sawe)



Wawancara dengan Basri (Kaur Keuangan Desa Buttu Sawe)



Wawancara dengan Tajuddin (Masyarakat Desa Buttu Sawe)



Wawancara dengan Hamka (Masyarakat Desa Buttu Sawe)



Wawancara dengan Sulpi (Masyarakat Desa Buttu Sawe)



Wawancara dengan Suriati (Masyarakat Desa Buttu Sawe)



Wawancara dengan Haris (Masyarakat Desa Buttu Sawe)



Rapat RKPDesa 2022 di Kantor Desa Buttu Sawe Pada Bulan Juli

BIOGRAFI PENULIS



Anugrah Pratiwi. Lahir di Kamali 22 Agustus 2001. Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Idrus dan ibu Santi. Saat ini penulis tinggal di kamali. Adapun pendidikan yang ditempuh penulis yaitu pada tahun 2007 masuk SD 169 Duampanua lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 2 Duampanua dan kemudian lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan jenjang

pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Pinrang dan selesai pada tahun 2019. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program studi Pengembangan Masyarakat Islam, fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Kemudian penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dikantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), serta penulis juga melaksnakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Soga kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Dan sekarang ini penulis sudah sampai ke jenjang akhir penyelesaian, penulis menyusun skripsi sebagai salah satu bentuk tugas akhir dengan judul "Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang".

